

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender prioritas pemerintah Perancis. Secara internasional, (MEAE) singkatan dari *Ministry for Europe and Foreign Affairs* atau Kementerian Prancis untuk Eropa dan Urusan Luar Negeri mewujudkan komitmen meningkatkan kesetaraan gender melalui kebijakan proaktif sedang diterapkan yakni kebijakan luar negeri feminis /*Feminist foreign policies* (FFPs).¹ Perancis memiliki prioritas dalam mengajukan kesetaraan gender di forum internasional dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kesenjangan serta pembangunan berkelanjutan, pemajuan hak-hak dasar serta ekonomi dan perdamaian dan keamanan. Upaya untuk mencapai 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Prancis dikoordinasikan oleh *The Interministerial Delegate for Sustainable Development (DIDD)*, yang diberi mandat oleh Perdana Menteri, dalam kemitraan yang erat dengan Kementerian Eropa dan Luar Negeri untuk dimensi internasional. Delegasi ini mengelola jaringan pejabat senior pembangunan berkelanjutan yang mengkoordinasikan semua masalah pembangunan berkelanjutan di berbagai kementerian. Upaya untuk memetakan kebijakan publik dalam kaitannya dengan SDGs perlu dilakukan, untuk memungkinkan kebijakan masing-masing

¹ *Ministre De L Europe Et Affaires Étrangères, Gender Equality: A Priority for France*, diakses dalam <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/women-s-rights/gender-equality-a-priority-for-france/> (27/5/2024,14:34 WIB)

kementerian dilihat melalui matriks konseptual yang disediakan oleh semua *SDGs*. Pencapaian Tujuan dari salah satu 17 *SDGs*, khususnya poin kelima tentang pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Internasional 1979 yang dikenal dengan istilah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW-1979) yang telah diratifikasi oleh Prancis pada tahun 1983² mengenai menghapus segala jenis diskriminasi terhadap kaum perempuan merupakan prioritas bagi Prancis. Prancis mengadvokasi hak-hak perempuan dan aktif berkontribusi pada adopsi dan implementasi *United Nations Security Council resolutions on Women (UNSCR on Women)* tentang seruan kepada beberapa negara untuk memperkuat perlindungan bagi seluruh wanita selama konflik dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam negosiasi perdamaian dan proses pengambilan keputusan.³

Emmanuel Macron telah memutuskan untuk memperbarui format *KTT G7* sebagai tuan rumah *G7 Summit* di Biarritz yang membahas mengenai kesetaraan gender dihadiri oleh Australia, Chile, India, Senegal, Spanyol and Ukraine.⁴ Negara-negara tersebut berkomitmen untuk memajukan pemberdayaan perempuan

² *Ministre De L Europe Et Affaires Étrangères, 2030 Agenda for Sustainable Development: How is France doing? (May 2017)*, diakses dalam <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/development-assistance/the-2030-development-agenda/article/2030-agenda-for-sustainable-development-how-is-france-doing-may-2017> (27/5/2024, 14:46 WIB)

³ *UN Human Rights Treaty Bodies, Ratification Status for CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, diakses dalam https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CEDAW&Lang=en (27/5/2024, 19:31 WIB)

⁴ *Ministre De L Europe Et Affaires Étrangères, What is feminist foreign policy?*, diakses dalam <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/women-s-rights/gender-equality-a-priority-for-france/> (27/5/2024, 21:09 WIB)

dan anak perempuan melalui aksi nasional. Sejak tahun 2017, *Accord de Paris kata lain dari* Ikrar Paris oleh Kementerian Eropa dan Urusan Luar Negeri pada peringatan Hari Perempuan Internasional, memanggil komunitas internasional untuk ikut andil dalam mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menjadi prioritas bagi Prancis. Pada 24 October 2017 dalam *UN Security Council (UNSC) declaration*, politikus Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan dalam mencegah dan melawan kekerasan terhadap perempuan Prancis bekerja tanpa henti untuk memastikan situasi perempuan lebih diperhitungkan dalam konflik untuk menanggapi ancaman spesifik yang mereka hadapi, melindungi dan memastikan partisipasi mereka dalam mengkonsolidasikan perdamaian.⁵

Meningkatkan kesetaraan gender adalah bentuk komitmen presidensi Prancis untuk Uni Eropa. Sejak Januari hingga Juni 2022, Prancis memegang Presidensi Dewan Uni Eropa dengan nama lain *Présidence Française du Conseil de l'Union Européenne (PFUE)* dalam pertemuan perwakilan dari Trio Kepresidenan yakni (Czech Republic, France and Sweden) yang telah menjadikan perjuangan melawan kekerasan berbasis seksual dan gender serta pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai prioritas bersama. Pada tahun 2025 Prancis berkomitmen untuk memastikan bahwa 75% dari proyek-proyek yang didanai oleh *France's official development assistance (FDA)* untuk meningkatkan kesetaraan gender. ⁶Di tingkat nasional, Perancis juga telah berkomitmen untuk memastikan

⁵ European Council, *G7 Leaders' Declaration - Biarritz, France, 26 August 2019*, diakses dalam <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/08/26/g7-leaders-declaration-biarritz-26-august-2019/> (30/5/2024, 19:31 WIB)

⁶ République Française, *Déclaration de MM. Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et Des Affaires Étrangères, et Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat Auprès Du Ministre de l'Europe et*

bahwa 50% dari bantuan pembangunan resminya bantuan pembangunan resmi *Official Development Assistance (ODA)* melalui *Agence Française de Développement (AFD)* sebagai badan pelaksana utama ODA Prancis telah dialokasikan untuk proyek-proyek kesetaraan gender.⁷

Menurut *European Institute for Gender Equality (EIGE)* terdapat indeks kesetaraan gender di Perancis mencakup berbagai aspek kesetaraan gender, termasuk partisipasi ekonomi, kekuasaan politik, dan akses terhadap pendidikan. Pada tahun 2017 index kesetaraan gender di Perancis sejak Emmanuel Macron menjabat sebagai presiden adalah 72.6% dari 100% hal ini berada di atas skor EU-28 yaitu 65,7%. Skor yang tinggi dalam Indeks Kesetaraan Gender berarti suatu negara hampir mencapai masyarakat yang setara gender.⁸ Indeks terendah yaitu dalam bidang sosial khususnya pendidikan yakni 66,1% menunjukkan lebih banyak jumlah wanita dibandingkan dengan jumlah pria yang memiliki gelar pendidikan tinggi (masing-masing 28% dan 26%). Segregasi gender di bidang pendidikan masih menjadi tantangan besar. Kesenjangan gender dalam pendidikan tinggi di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, humaniora, dan seni masih tetap sama yakni 42% pelajar perempuan dibandingkan dengan 22% pelajar laki-laki. Dalam bidang politik mencapai skor 68,2% yang mengalami peningkatan yang

Des Affaires Étrangères, Sur La Politique Étrangère de La France et Le Budget Pour 2018, Au Sénat Le 24 Octobre 2017, diakses dalam <https://www.vie-publique.fr/discours/204084-declaration-de-mm-jean-yves-le-drian-ministre-de-leurope-et-des-affai> (05/6/2024, 11:54 WIB)

⁷ Mission Permanente De La France Auprès Des Nations Unies À New York, *Women's Rights Are a Priority of French Foreign Policy*, diakses dalam <https://onu.delegfrance.org/women-s-rights-are-a-priority-of-french-foreign-policy> (05/6/2024, 12:33 WIB)

⁸ European Institute for Gender Equality, *Gender Equality Index European Union in 2017*, diakses dalam <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2017> (05/6/2024, 19:42 WIB)

signifikan berkat meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kekuasaan ekonomi dan politik, meskipun dalam kategori indeks dengan skor di bawah rata-rata EU. Indeks kesetaraan gender tertinggi dalam bidang kesehatan mencapai 87,1% kemudian pada bidang ekonomi yaitu 86,1% Situasi di bidang ekonomi telah membaik karena semakin besarnya kesetaraan gender dalam pendapatan. Pendapatan perempuan hampir 18% lebih rendah dibandingkan laki-laki per bulan. Di sisi lain, situasi kesetaraan gender dalam hal kemiskinan mengalami stagnasi.

Kekerasan terhadap perempuan tidak berdampak pada skor akhir Indeks Kesetaraan Gender. Dalam bidang kekerasan, semakin tinggi skornya, maka semakin serius pula fenomena kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut. Oleh karena itu, negara dengan kinerja terbaik adalah negara dengan skor terendah. Dari perspektif statistik, domain kekerasan tidak mengukur kesenjangan diantara laki-laki dan perempuan namun hal ini mengukur dan menganalisis pengalaman kekerasan yang dialami perempuan. Skor Perancis untuk bidang kekerasan adalah 29,1%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata UE yakni 28,3%. Di tingkat masyarakat, kekerasan terhadap perempuan merugikan ekonomi Prancis sekitar EUR 29 miliar per tahun melalui hilangnya output ekonomi, pemanfaatan layanan, dan biaya pribadi.

Pada tahun 2019 indeks kesetaraan gender di Perancis yaitu 74.6% dari 100%, Perancis berada jauh di atas rata-rata negara-negara EU-28 yaitu sebesar 66,9%.⁹ Pada tahun 2021 ada 75,5%, Prancis menempati peringkat ke-3 di UE

⁹ European Institute for Gender Equality, *Gender Equality Index European Union in 2019*, diakses dalam <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019> (05/6/2024, 20:45 WIB)

dalam Indeks Kesetaraan Gender lebih tinggi dari skor UE 68%.¹⁰ Dengan kemajuan yang sedikit lebih cepat menuju kesetaraan gender dibandingkan Negara Anggota lainnya khususnya dalam bidang politik yakni dengan skor 81,4% jauh lebih tinggi dari rata-rata EU yakni 55%, pada tahun 2021 mencapai jumlah anggota dewan perempuan di organisasi penyiaran milik publik telah meningkat. Jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen dan menteri perempuan meningkat. Perancis memperkenalkan kuota legislatif sebesar 50% dari 2000. Jumlah perempuan di dewan perusahaan publik terbesar dan jumlah perempuan di dewan bank sentral telah meningkat. Pada tahun 2021 terdapat ketidaksenjangan gender dalam bidang sosial dan ekonomi menunjukkan lebih banyak jumlah wanita dibandingkan dengan jumlah pria yang melakukan pekerjaan rumah tangga serta mengasuh anak, cucu, orang lanjut usia atau penyandang disabilitas setiap hari selama minimal 1 jam. Kesenjangan gender dalam kegiatan perawatan kesehatan termasuk yang tertinggi yakni 87,4%. Dalam bidang ekonomi yakni 86,3% yang mana perempuan terus memperoleh upah penghasilan yang memiliki nilai jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh laki-laki. Terhadap pasangan yang memiliki anak menunjukkan bahwa perempuan memperoleh penghasilan 30 % jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan penghasilan upah laki-laki, serta pada pasangan tanpa anak, perempuan menunjukkan 26 % memperoleh penghasilan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kesenjangan gender yang ada dalam pendapatan bulanan rata-rata jauh

¹⁰ European Institute for Gender Equality, *Gender Equality Index European Union in 2021*, diakses dalam <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021> , (06/6/2024, 13:39 WIB)

lebih besar pada kelompok usia 50–64 tahun (30%). Hal yang sama juga terjadi pada kesenjangan pensiun gender.

Pada tahun 2022 indeks kesetaraan gender mencapai 75,1%. Dengan skor ini menunjukkan bahwa Prancis berhasil dalam meningkatkan kesetaraan gender dan berada di peringkat ke-5 di Uni Eropa dalam Indeks Kesetaraan Gender. Skornya 6,5 % di atas skor Uni Eropa. Peringkat Prancis adalah yang tertinggi dalam bidang politik di mana Prancis berada di peringkat ke-2 dengan skor 81,7%. Dalam bidang politik juga khususnya dalam subranah pengambilan keputusan Prancis mendapatkan peringkat ke-1 dengan skor 85,8% yang meningkat 44,6% sejak tahun 2010. Dalam bidang ekonomi yakni dengan skor 84,7% peringkatnya hanya sedikit turun satu peringkat yang mana di dua dibidang tersebut dari tahun 2019 skor Prancis sedikit menurun sebesar 0,4 poin hingga tahun 2022. Hal yang masih perlu perbaikan dalam hal meningkatkan kesetaraan gender yakni dalam bidang sosial subranah pendidikan karena menunjukkan skor 65,5%.

Pada tahun 2023 indeks kesetaraan gender mencapai 75,7%. Kesenjangan antara negara ini dan *UE* semakin melebar seiring berjalannya waktu. Ketidaksetaraan gender ada pada bidang pendidikan yaitu 65,2% dimana negara tersebut menempati peringkat ke-11 di *EU*.¹¹ Prancis telah mengungguli negara-negara anggota lainnya dalam bidang ekonomi. Skor Indeks Kesetaraan Gendernya berada di atas rata-rata *UE*, dan tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara

¹¹ European Institute for Gender Equality, *Gender Equality Index European Union in 2023*, diakses dalam <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023> (06/6/2024, 14:51 WIB)

anggota lainnya. Kemajuan dalam bidang ekonomi dengan skor 84,9%. Kemajuan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dalam pengambilan keputusan sosial dalam politik. Peringkat Prancis naik dari peringkat ke-7 ke posisi ke-2. Ini merupakan kenaikan peringkat terbesar dari seluruh Negara Anggota *EU*. Pada bidang politik Prancis memperoleh skor da 84,9% menempati peringkat 1 *UE*. Hal ini menunjukkan komitmen Prancis untuk mendorong kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan dan inisiatif yang mendukung kesetaraan di berbagai bidang. Berdasarkan data tersebut skor indeks kesetaraan gender yang meningkat dapat diukur bahwa Pemerintah Macron masa jabatan periode pertama berhasil dalam meningkatkan kesetaraan gender di Perancis maka penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah Perancis dalam meningkatkan kesetaraan gender Era Presiden Emmanuel Macron.

1.2 Rumusan Masalah

Bertumpu pada bagian latarbelakang, sehingga penelitian merumuskan permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana upaya pemerintah Prancis dalam meningkatkan kesetaraan gender di era Emmanuel Macron?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bertujuan menelaah upaya pemerintah Prancis meningkatkan kesetaraan gender pada masa kepemimpinan Emmanuel Macron. Berkenaan dengan tujuan lainnya yakni memberi wawasan kesadaran bagi setiap manusia bahwa setiap

gender baik perempuan dan laki-laki berhak atas kebebasan dan perlindungan hak asasinya. Setiap individu tanpa memandang gender berhak memperoleh pemenuhan hak secara setara dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Melalui perluasan pengetahuan dan wawasan, penulis mengharapkan agar penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah akademik serta menjadi rujukan dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Temuan penelitian ini diharapkan signifikan menyebarkan dampak positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hubungan internasional yang menitikberatkan pada analisis gender, pemberdayaan wanita di Prancis, ketimpangan gender di bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta peran aktif pemerintah Prancis dan organisasi internasional untuk mendukung upaya meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang di Perancis.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penulis adapun sangat berkeinginan agar penelitian mampu memperdalam kognisi, baik tertuju pada pengkaji sendiri maupun bagi khalayak luas, mengenai beberapa isu pemberdayaan wanita serta urgensi kesetaraan hak bagi seluruh individu di berbagai belahan dunia tanpa memandang perbedaan dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik.

1.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu untuk mendukung keabsahan tulisan. Analisa tersebut diambil dari jurnal serta tesis yang relevan dengan topik penelitian. Penulis hanya menggunakan penelitian yang sesuai dengan judul yaitu Upaya Pemerintah Perancis Era Emmanuel Macron dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender

Jurnal rujukan pertama berjudul Upaya Pemerintah Islandia dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender (Studi Kasus: Fenomena *Gender Pay Gap* di Dunia Kerja ditulis oleh Chandra, Arlina Alfiani. Penelitian ini diterbitkan oleh Universitas Mataram pada tahun 2024 yang menjelaskan mengenai Upaya pemerintah Islandia untuk menghadapi kesenjangan upah gender. Kesenjangan upah di Islandia terjadi dalam kurun waktu yang lama dengan persentase gap sekitar 18%. Faktor-faktor penyebab kesenjangan upah antara lain segregasi pekerjaan berdasarkan gender, pendidikan, pengaturan dan transparansi upah yang masih tertutup, serta perbedaan tanggung jawab dalam keluarga. Kesenjangan upah berbasis gender menyebabkan kerugian ekonomi bagi perempuan dan menyebabkan pertumbuhan kemiskinan semakin meningkat. Oleh karena itu, masyarakat khususnya pekerja perempuan di Islandia mengadakan demonstrasi untuk menuntut langkah penyelesaian dari pemerintah agar kesenjangan upah berbasis gender dapat segera diberantas. Pemerintah Islandia telah mengambil beberapa langkah untuk menghadapi kesenjangan upah gender yakni sertifikasi kesetaraan gaji *Equal Pay Certification* dan Undang-Undang tentang Status yang Sama dan Hak yang Sama Terlepas dari Gender. Kesenjangan upah yang berbasis

gender di Islandia menyempit setiap tahunnya dan menyisakan *gap* sebesar 4.3%. Hasil ini memperlihatkan besarnya kemungkinan bahwa penerapan kebijakan kesetaraan upah dapat menutup kesenjangan upah antar gender secara keseluruhan.¹² Relevansi dengan penelitian ini yaitu karena keduanya membahas upaya pemerintah namun terdapat perbedaan dimana dalam penelitian tersebut membahas menyoroti upaya pemerintah Islandia dalam mengatasi kesenjangan upah gender dalam bidang ekonomi, sementara penelitian ini membahas berbagai upaya pemerintah Perancis dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam aspek yang lebih luas seperti kesetaraan dalam ekonomi, politik dan sosial.

Jurnal rujukan kedua yakni *Iceland is the Best, but Still Not Equal* yang ditulis oleh Olafsdottir, Katrin (2018) dari Reykjavik University, menjelaskan bahwa Untuk mencapai kesetaraan gender di pasar tenaga kerja, lingkungan hukum harus mendukung kesetaraan. Semua gender mempunyai kesempatan setara dalam memilih pekerjaan dan pendidikan, serta dibayar sama untuk kontribusi yang sama. Kesetaraan gender juga berarti memiliki akses yang sama ke posisi kekuasaan.¹³ Relevansi dengan penelitian ini yakni dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa Islandia merupakan negara yang sudah menduduki peringkat atas untuk penerapan kesetaraan gendernya, namun kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai yakni kesetaraan gender dalam bidang politik, kesetaraan upah dalam aspek ekonomi dan

¹² Arlina Alfiani Chandra, *Upaya Pemerintah Islandia Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender (Studi Kasus: Fenomena Gender Pay Gap Di Dunia Kerja*. Indonesian Journal of Global Discourse, Vol, 5, No, 15 (2023), NTB : Universitas Mataram, hal. 1.

¹³ Katrin Olafsdottir, *Iceland Is the Best, but Still Not Equal*. Scandinavian University Press, Vol, 35, No, 2 (2018), Skandinavia : Universitetsforlaget, hal. 111.

kesejahteraan dalam ketenagakerjaan menjadi faktor kunci yang harus dicapai, hal ini akan dibahas dalam penelitian ini mengenai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan dalam berbagai aspek yakni ekonomi, politik, dan sosial.

Jurnal rujukan ketiga *Efforts of Indonesian to Improve of Gender Equality on ASEAN Economic Community (AEC)* yang ditulis oleh Bangun, Wilson dari Maranatha Christian University Indonesia tahun 2016. Penelitian tersebut menyoroti kesenjangan gender, baik dalam nilai Indeks Pembangunan Gender / *Gender Development Index (GDI)* maupun Pengukuran Pemberdayaan Gender / *Gender Empowerment Measure (GEM)*, yang mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap perempuan.¹⁴ Hal ini terlihat dari indikator-indikator terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan kesehatan perempuan. Studi ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan perbedaan gender, dan membuahkan hasil yang positif. Penelitian menunjukkan bahwa indikator pendidikan sangat rendah sehingga memerlukan perhatian serius. Pemerintah telah mengalokasikan 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*APBN*) untuk pendidikan dan melaksanakan 9 tahun untuk program wajib belajar. Pemerintah sudah melaksanakan program penyediaan kartu sehat dan pintar kepada masyarakat miskin. Kartu ini menjamin pemegang kartu terbebas dari biaya pengobatan dan biaya pendidikan tingkat SD hingga SMA. Terdapat perbedaan yang signifikan

¹⁴ Wilson Bangun et. al., *Effort to Gender Equality in Indonesia, Compared on ASEAN*. Enpress Publisher Journal of Infrastructure Policy and Development, Vol, 8, No, 8 (2024), Bandung : Universitas Kristen Maranatha, hal. 1.

dalam indikator pendapatan, dimana Pendapatan Nasional Bruto (*GNI*) per kapita perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh kesenjangan yang lebar diantara kedua gender dalam indikator ekonomi. Menurut laporan ini, perempuan terus berpartisipasi dalam perekonomian lebih minim daripada laki-laki. Upah wanita relatif rendah daripada pria, dan diskriminasi upah jauh lebih memprihatinkan bagi perempuan yang bekerja di sektor informal atau sebagai buruh lepas. Relevansi dari penelitian ini yakni karena keduanya membahas upaya pemerintah namun dalam konteks yang berbeda, dalam penelitian tersebut membahas peran pemerintah Indonesia dalam mengurangi kesenjangan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi sedangkan di penelitian ini akan membahas mengenai upaya Pemerintah Perancis era Emmanuel Macron dalam meningkatkan kesetaraan gender secara lebih luas, termasuk aspek lain seperti kesetaraan dalam sosial, politik dan ekonomi. Keduanya juga menekankan pentingnya kesetaraan upah dalam mencapai kesetaraan gender secara keseluruhan.

Jurnal rujukan keempat *Fathering Japan: Japan's Strategy for Achieving Gender Equality in Response to UN Criticism* ditulis oleh Rudiono, Havidz Ageng Prakoso. Penelitian ini diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2022. Jurnal ini bertujuan untuk menguraikan strategi yang diterapkan oleh Jepang dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender sebagai bentuk respons terhadap kritik yang disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*PBB*), khususnya melalui pelaksanaan *Ikumen Project* dan *Non Profit Organization (NPO) Fathering Japan*. Studi ini berfokus pada strategi yang digunakan oleh pemerintah Jepang dan

organisasi masyarakat sipil untuk memberdayakan laki-laki dan perempuan.¹⁵ Penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan gender, yang melibatkan upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesetaraan gender. Penelitian ini menyoroti masih kuatnya nilai-nilai patriarki dalam masyarakat Jepang, yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender. Kolaborasi antara pemerintah Jepang dan *NPO Fathering Japan* telah meningkatkan partisipasi pria dalam pengasuhan anak, yang merupakan langkah signifikan menuju kesetaraan gender. Penelitian ini mencatat bahwa Jepang telah menghadapi kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (*PBB*) terkait masalah ketidaksetaraan gender, terutama melalui hukum internasional *CEDAW*. Jurnal penelitian keempat ini relevan dengan jurnal penelitian ini karena melihat bagaimana upaya pemerintah Jepang dalam mencapai kesetaraan gender dengan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Penelitian tersebut menyoroti kuatnya nilai-nilai patriarki dalam masyarakat Jepang yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender, sementara jurnal ini membahas berbagai upaya pemerintah Perancis dalam meningkatkan skor indeks kesetaraan gender secara lebih luas, termasuk aspek kesetaraan dalam sosial, politik dan ekonomi.

Tesis rujukan kelima *Peran UN Women Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Melalui We Empower Asia*, ditulis oleh Prasanti, Dieska Noor. Penelitian ini diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2024 yang menjelaskan peran organisasi *UN Women* terkait isu

¹⁵ Rudiono et. al., *Fathering Japan: Japan's Strategy for Achieving Gender Equality in Response to UN Criticism*. Jurnal Perempuan Dan Anak, Vol, 5, No, 1 (2022), Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, Hal. 11.

wanita, perdamaian dan keamanan di Indonesia bersama dengan Uni Eropa yang meluncurkan program *WeEmpowerAsia* yang bertujuan untuk membentuk landasan kemitraan yang kokoh guna mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan.¹⁶ Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian ini, peran UN Women sebagai organisasi internasional dapat dikatakan berhasil dalam upaya menjalankan tugasnya dalam memenuhi peran inisiator, fasilitator, dan penentu untuk memenuhi tiga indikator sasaran upaya *WeEmpowerAsia* Indonesia. Jurnal penelitian kelima ini relevan dengan jurnal penelitian ini karena melihat bagaimana upaya organisasi *UN Women* sebagai organisasi internasional hadir untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu perempuan, perdamaian dan keamanan di Indonesia bersama dengan Uni Eropa yang meluncurkan program *WeEmpowerAsia*, sementara jurnal ini membahas berbagai upaya pemerintah Perancis sebagai anggota Uni Eropa dalam meningkatkan skor indeks kesetaraan gender secara lebih luas, termasuk aspek kesetaraan dalam sosial, politik dan ekonomi.

Jurnal rujukan keenam, *Analisis Gender Based Violence* dalam Konvensi *CEDAW* pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan yang ditulis oleh Kardina dan Anisa Marlinda Yurisa. Penelitian ini diterbitkan oleh Universitas Fajar pada tahun 2021. Penelitian ini membahas penerapan Konvensi *CEDAW* dalam menangani isu Kekerasan Berbasis Gender di Korea Selatan, yang merupakan permasalahan umum dengan perempuan sebagai kelompok korban utama.

¹⁶ Dieska Noor Prasanti, 2024, *Peran UN Women Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia Melalui We Empower Asia*, Skripsi, Malang : Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal. 1.

Penelitian ini menggunakan perspektif Feminisme Radikal, dengan mengacu pada konsep kepatuhan terhadap norma internasional dan kekerasan berbasis gender.¹⁷ Permasalahan ekonomi dan masyarakat patriarkis adalah dua penyebab utama masalah ini. *Konfusianisme* berperan sebagai landasan dalam pembentukan budaya patriarki yang mengandung ajaran-ajaran diskriminatif terhadap perempuan serta berkontribusi pada ketimpangan ekonomi, yang keduanya menjadi faktor pemicu meningkatnya kekerasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun Korea Selatan telah meratifikasi *CEDAW* sejak tahun 1984, masih ada hambatan besar dalam implementasinya. Selain faktor kesenjangan ekonomi yang berkontribusi pada meningkatnya kekerasan berbasis gender, jurnal penelitian keenam relevan dengan jurnal penelitian ini karena membahas implementasi upaya dari suatu aktor dalam menangani kekerasan berbasis gender, sebuah masalah yang lazim terjadi di mana target korbannya adalah perempuan, dan keberadaan *Konfusianisme* yang menjadi fondasi budaya patriarki dengan ajaran inti yang mendiskriminasi perempuan. Kondisi kesetaraan gender di Perancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron juga dibahas dalam penelitian ini, bersama dengan inisiatif pemerintah Perancis sebagai anggota Uni Eropa untuk meningkatkan nilai indeks kesetaraan gender di bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Jurnal rujukan ketujuh, *A Feminist Perspective on France's Youth for Equality Programme: discussing gender equality, sexuality and violence in school*

¹⁷ Kardina, *A Analisis Gender Based Violence Dalam Konvensi CEDAW Pada Isu Kekerasan Seksual Di Korea Selatan*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO, Vol, 1, No, 2 (2021), Majene : Universitas Sulawesi Barat, Hal. 156.

yang ditulis oleh Eugénie Forno. Penelitian ini diterbitkan oleh *Gender Studies*, Utrecht University pada tahun 2015. Implementasi *France's Youth for Equality Programme* telah didengar wakil presiden wilayah Perancis untuk memberikan dampak dalam menciptakan kesetaraan gender yang langgeng dalam sistem pendidikan yang secara implisit mengajarkan perilaku yang bias gender perlu diubah. Program ini memiliki berpotensi menawarkan solusi jangka panjang dengan memberdayakan kaum muda untuk mengambil bertanggung jawab atas masa depan yang mendobrak tabu dan bertujuan untuk menghilangkan seksis yang dinormalisasi, homofobia, rasis, dan kekerasan.¹⁸ Jurnal penelitian ketujuh ini relevan dengan jurnal penelitian yang akan dibahas dikarenakan kaitan keduanya membahas upaya pemerintah Perancis dalam meningkatkan tingkat kesetaraan gender. Jurnal tersebut menyoroti program *France's Youth for Equality* yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan, sementara jurnal ini akan membahas berbagai upaya pemerintah Prancis dalam meningkatkan kesetaraan gender secara meluas termasuk aspek lain seperti kesetaraan dalam sosial, politik dan ekonomi. Keduanya juga menekankan pentingnya pemberdayaan gender dalam meningkatkan indeks kesetaraan gender secara keseluruhan.

Jurnal rujukan kedelapan *Building Partnership Capacity at the Ministerial Level to Improve Gender Equality* oleh Heiple, Geoffrey J tahun 2014 oleh DTIC.

¹⁸ Eugénie Forno, 2015, *A Feminist Perspective On France's Youth For Equality Programme: Discussing Gender Equality, Sexuality And Violence In School*, Tesis. Utrecht : Universitas Utrecht Belanda, Hal. 76.

membahas apakah Amerika Serikat dapat membangun kapasitas kelembagaan di tingkat kementerian melalui kerja sama keamanan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Studi ini mempertimbangkan hal ini melalui analisis kepentingan nasional Amerika Serikat, peran budaya dalam masyarakat, dan pendekatan Keseluruhan Pemerintahan yang diterapkan oleh komunitas kebijakan dan keamanan Amerika Serikat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat kementerian melalui kerja sama keamanan untuk meningkatkan kesetaraan gender.¹⁹ Studi ini menyarankan untuk mengatasi tantangan ekonomi untuk memastikan bahwa kerja sama keamanan berkelanjutan dan efektif. Penelitian ini menekankan perlunya mengembangkan pasukan militer dan keamanan yang kompeten untuk mencegah konflik dan melindungi warga sipil terutama anak-anak dan wanita. Rekomendasi ini yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kesetaraan gender dengan membangun kapasitas kelembagaan, mengatasi tantangan ekonomi, dan mengembangkan kekuatan militer dan keamanan yang kompeten. Jurnal penelitian kedelapan ini relevan dengan jurnal penelitian Upaya Pemerintah Perancis dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender Era Presiden Emmanuel Macron karena keduanya membahas upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender di negaranya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat kementerian melalui kerja sama keamanan untuk meningkatkan kesetaraan gender melalui analisis kepentingan nasional AS, peran budaya dalam masyarakat, dan pendekatan Keseluruhan Pemerintahan yang

¹⁹ Geoffrey J. Heiple, *Building Partnership Capacity At The Ministerial Level To Improve Gender Equality*, diakses dalam <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA610953.pdf> (17/6/2024, 13:42 WIB)

diterapkan oleh komunitas kebijakan dan keamanan AS dengan mengembangkan pasukan militer dan keamanan yang kompeten untuk mencegah konflik dan melindungi warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak serta mengatasi tantangan ekonomi untuk memastikan bahwa kerja sama keamanan berkelanjutan dan efektif. Yang dimana jurnal ini akan membahas berbagai upaya pemerintah Prancis dalam meningkatkan kesetaraan gender secara meluas termasuk aspek lain seperti kesetaraan dalam sosial, politik dan ekonomi serta menekankan pentingnya pemberdayaan gender dalam meningkatkan indeks kesetaraan gender dalam seluruh aspek.

Jurnal rujukan kesembilan *Upaya Korea Women's Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan* ditulis Oktavia Widya Kumalasari dan Hamdan Nafiatur Rosyida tahun 2022 oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Berdasarkan hasil penelitian ini, kondisi ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia di Korea Selatan tergolong sangat baik, namun kesetaraan gender belum berjalan seiring dengan pencapaian tersebut. Dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen, Korsel menempati peringkat ke-107 dari 156 negara, yang mencerminkan adanya kurangnya tingkat kesetaraan gender, khususnya di ranah politik. Kondisi ini mendorong perempuan serta organisasi masyarakat sipil seperti Persatuan Asosiasi Perempuan Korea *KWAU* berupaya meningkatkan kesetaraan gender bidang politik Korea Selatan.²⁰

²⁰ Oktavia et. al., *Upaya Korea Women's Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender Di Ranah Politik Korea Selatan*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah Vol, 6, No, 1 (2022), Padang Sidempuan : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Hal. 1.

Penelitian ini menunjukkan bahwa *KWAU* telah melakukan beberapa upaya meningkatkan kesetaraan gender dalam lingkup politik di negara Korea Selatan. Upayanya diantaranya yakni keterlibatan langsung dalam parlemen, melakukan advokasi dan lobi politik, berpartisipasi dalam perumusan undang-undang, mengusulkan kebijakan, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, partai politik, dan para pemangku kekuasaan. Di samping itu, *KWAU* juga menjalin kedekatan dengan masyarakat melalui penyediaan ruang publik dan penyelenggaraan berbagai kegiatan. Jurnal penelitian kesembilan ini relevan dengan jurnal penelitian Upaya Pemerintah Perancis dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender Era Presiden Emmanuel Macron karena keduanya membahas upaya pemerintah namun dalam konteks yang berbeda yang mana penelitian ini membahas upaya pemerintah Korea Selatan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang politik saja. Sedangkan dalam penelitian ini akan fokus membahas mengenai upaya pemerintah Perancis untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Terlebih dalam hal ini masih jarang ada penelitian di Indonesia yang membahas mengenai isu kesetaraan gender di Perancis

Jurnal rujukan kesepuluh Upaya *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia melalui Program *Sustainable Development Goals (SDGs)* ditulis Jatmiko, Sunjoyo tahun 2019 oleh Universitas Khatolik Parahyangan. Studi ini meneliti bagaimana program *SDGs* dari *UNDP* telah meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia Studi ini meneliti *UNDP* merupakan suatu organisasi tingkat internasional yang mengedepankan

kesetaraan gender dan mencapai target tingkat kesetaraan gender yakni fokus tujuan *SDGs* kelima dengan adanya agenda pembangunan global selama 15 tahun yang diinisiasi oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNDP*).²¹ Tiga inisiatif yang dilakukan *UNDP* diantaranya Kampanye dilaksanakan selama 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Wanita, Program Segel Sertifikasi Kesetaraan Gender, dan Strategi Pengarusutamaan Gender (2018–2021), telah menunjukkan efektivitasnya, sebagaimana tercermin dari perkembangan positif kesetaraan gender dan tercapainya sebagian besar tujuan program. Relevansi dari jurnal ini dengan penelitian ini yakni peran suatu aktor yakni organisasi internasional *UNDP* dalam menangani isu kesetaraan gender di Indonesia sedangkan dalam penelitian ini akan membahas upaya strategi dari Pemerintah Perancis dalam meningkatkan isu kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| Nama Penulis | Tahun | Judul Penelitian | Metode/ Teori | Hasil |
|------------------------------|-------|--|----------------------------|---|
| Arlina Alfiani Chandra | 2024 | Upaya Pemerintah Islandia dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender (Studi Kasus: Fenomena <i>Gender Pay Gap</i> di Dunia Kerja | teknik analisis kualitatif | Pemerintah Islandia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kesenjangan upah gender, seperti sertifikasi kesetaraan gaji (<i>Equal Pay Certification</i>) dan Undang-Undang tentang Status yang Sama dan Hak yang Sama Terlepas dari Gender, sehingga pemerataan |

²¹ Sunjoyo Jatmiko, *Upaya United Nations Development Programme (UNDP) Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender Di Indonesia Melalui Program Sustainable Development Goals (SDGs)*, (2019) Skripsi, Bandung : Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Hal. 1.

| | | | | |
|--------------------------------|------|--|-----------------------|--|
| | | | | upah berbasis gender di Islandia menyempit setiap tahunnya dan menyisakan kesenjangan sebesar 4.3%. |
| Katrin Olafsdottir | 2018 | <i>Iceland is the Best, but Still Not Equal</i> | Kualitatif | Penelitian ini menunjukkan bahwa Islandia ialah negara berperingkat tinggi dalam penerapan kesetaraan gender, akan tetapi kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai. Untuk membuktikan kesetaraan gender, kesetaraan upah dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan menjadi faktor kunci yang harus dicapai |
| Wilson Bangun | 2016 | <i>Efforts of Indonesian to Improve of Gender Equality on ASEAN Economic Community (AEC)</i> | Kualitatif | Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai Indonesia memiliki ketimpangan gender terbesar di antara negara ASEAN-5. Berbagai upaya pemerintah Indonesia meningkatkan kesetaraan gender yakni meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari total APBN, pemberian kartu kesehatan dan kartu pintar untuk masyarakat miskin, dan pemberlakuan UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan yang mensyaratkan minimal 30% dari anggota parlemen adalah perempuan. |
| Rudiono & Havidz Ageng Prakoso | 2022 | <i>Fathering Japan: Japan's Strategy for Achieving Gender Equality</i> | Deskriptif Kualitatif | Dalam rangka mengatasi ketimpangan gender yang berakar pada nilai-nilai budaya tradisional, khususnya sistem patriarki yang telah menjadi sorotan |

| | | | | |
|-----------------------------------|------|---|--|--|
| | | <i>in Response to UN Criticism</i> | | dan mendapat desakan dari berbagai panel Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Jepang menjalin kemitraan dengan organisasi nirlaba Fathering Japan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong tercapainya kesetaraan gender. |
| Dieska Noor Prasanti | 2024 | Peran UN Women Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia Melalui <i>We Empower Asia</i> | Deskriptif Kualitatif | Berdasarkan hasil penelitian, peran UN Women sebagai organisasi internasional dapat dikatakan berhasil dalam upaya menjalankan tugasnya dalam memenuhi peran inisiator, fasilitator, dan penentu untuk memenuhi tiga indikator tujuan pemberdayaan perempuan di Indonesia melalui WeEmpowerAsia Indonesia. |
| Kardina dan Anisa Marlinda Yurisa | 2021 | Analisis <i>Gender Based Violence</i> dalam <i>Konvensi CEDAW</i> pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan | Kualitatif | Penelitian ini menggunakan perspektif feminisme radikal, fokus dalam permasalahan ekonomi dan masyarakat patriarkis adalah dua penyebab utama masalah ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Korea Selatan telah meratifikasi <i>CEDAW</i> sejak tahun 1984, masih terdapat hambatan besar dalam implementasinya. |
| Eugénie Forno | 2015 | <i>A Feminist Perspective on France's Youth for Equality Programme: discussing</i> | Teknik peneliti kuantitatif, kualitatif, dan | Implementasi <i>France's Youth for Equality Programme</i> telah didengar wakil presiden wilayah Perancis untuk memberikan dampak dalam menciptakan kesetaraan |

| | | | | |
|--|------|--|-----------------------|---|
| | | <i>gender equality, sexuality and violence in school</i> | campuran-feminis | gender yang langgeng dalam sistem pendidikan yang secara implisit mengajarkan perilaku yang bias gender perlu diubah. Program ini memiliki berpotensi menawarkan solusi jangka panjang dengan memberdayakan kaum muda |
| Geoffrey Heiple | 2014 | <i>Building Partnership Capacity at the Ministerial Level to Improve Gender Equality</i> | pendekatan kualitatif | Studi ini menyarankan untuk mengatasi tantangan ekonomi untuk memastikan bahwa kerja sama keamanan berkelanjutan dan efektif. Penelitian ini menekankan perlunya mengembangkan pasukan militer dan keamanan yang kompeten untuk mencegah konflik dan melindungi warga sipil. Bertujuan dalam meningkatkan kesetaraan gender dengan membangun kapasitas kelembagaan, mengatasi tantangan ekonomi, dan mengembangkan kekuatan militer dan keamanan yang kompeten. |
| Oktavia Widya Kumalasari dan Hamdan Nafiatur Rosyida | 2022 | Upaya Korea Women's Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan | Pendekatan Kualitatif | Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>KWAU</i> berupaya meningkatkan kesetaraan gender pada bidang politik di Korea Selatan. Upaya yang dilakukan ini termasuk mengunjungi parlemen secara langsung, terlibat dalam lobi politik, membuat undang-undang secara langsung, mengusulkan |

| | | | | |
|--------------------|------|--|-----------------------|--|
| | | | | kebijakan, mengawasi kebijakan, memantau partai politik, dan memantau mereka yang memegang jabatan. |
| Sunjoyo Jatmiko | 2019 | Upaya <i>United Nations Development Programme (UNDP)</i> dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia melalui Program <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> ” | Deskriptif kualitatif | Upaya yang diimplementasikan <i>UNDP</i> di negara Indonesia sudah menunjukkan arah positif dan efektif dalam perkembangan kesetaraan gender di Indonesia sebagaimana tercermin dari pencapaian sebagian besar tujuan yang menjadi dasar pelaksanaan program-program <i>UNDP</i> . |

1.5 Landasan Konseptual

1.5.2 Konsep Kebijakan Publik Feminis

Kebijakan publik feminis merupakan paradigma kebijakan yang mengintegrasikan perspektif feminis dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah. Konsep ini berakar dari teori hukum feminis atau *feminist legal theory* yang memandang bahwa hukum dan kebijakan konvensional seringkali mengabaikan posisi dan perspektif perempuan, serta melanggengkan subordinasi perempuan dalam sistem patriarki.²² Kebijakan publik feminis tidak hanya berfokus pada isu-isu yang secara eksplisit berkaitan dengan perempuan, tetapi lebih

²² Triantono, *Feminis Legal Theory Dalam Kerangka Hukum Indonesia*. Jurnal Undip, Vol 1, No, 1 (2023), Magelang : Universitas Tidar Kardina, Hal. 16.

fundamental lagi, ia berupaya mentransformasi cara pandang dan pendekatan dalam seluruh spektrum kebijakan publik dengan menempatkan kesetaraan gender sebagai prinsip fundamental.

Dalam konteks teori politik feminis, kebijakan publik feminis dipahami sebagai instrumen untuk menghapuskan ketimpangan gender dan meningkatkan partisipasi sosial dan politik perempuan secara substantif. Teori ini memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai dinamika kekuatan politik, bukan sebagai sesuatu yang alamiah. Oleh karena itu, kebijakan publik feminis mengakui bahwa ketidaksetaraan gender adalah hasil dari konstruksi sosial dan politik yang dapat diubah melalui intervensi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

Karakteristik utama kebijakan publik feminis meliputi beberapa dimensi penting. Pertama, kebijakan ini bersifat transformatif, tidak hanya responsif terhadap masalah gender yang sudah ada, tetapi berupaya mengubah struktur dan sistem yang melanggengkan ketidaksetaraan. Kedua, kebijakan ini menerapkan pendekatan interseksional yang mengakui bahwa pengalaman perempuan tidak homogen dan dipengaruhi oleh berbagai faktor identitas seperti ras, kelas, orientasi seksual, dan faktor sosial lainnya. Ketiga, kebijakan publik feminis menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam seluruh proses kebijakan, mulai dari agenda setting hingga evaluasi dampak. Keempat, kebijakan ini menggunakan analisis gender sebagai alat untuk memahami dampak diferensial kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan, serta berupaya memastikan bahwa kebijakan tidak memperburuk kesenjangan yang ada. Kebijakan publik feminis tidak hanya mengakui pentingnya perawatan tetapi juga mendesak tindakan konkret dalam

bentuk kebijakan dan dukungan agar pekerjaan tersebut diapresiasi, diorganisir, dan diberi kompensasi yang adil sebagai bagian dari fondasi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.²³

Implementasi kebijakan publik feminis memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah, alokasi sumber daya yang memadai, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang sensitif gender. Kebijakan ini juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa perspektif yang beragam dapat terintegrasi dalam proses kebijakan. Selain itu, kebijakan publik feminis juga harus didukung oleh data dan riset yang berkualitas tentang kondisi dan kebutuhan perempuan, serta sistem informasi yang dapat melacak kemajuan dalam pencapaian kesetaraan gender.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang mendeskripsikan variabel-variabel yang terkait dengan suatu fenomena sosial untuk mengidentifikasinya. Pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan serta menginterpretasi keadaan dan hubungan yang ada saat ini.²⁴ Tujuan utama peneliti dalam penelitian ini adalah untuk

²³ Sari, et. al., *Prinsip dan pendekatan kebijakan publik feminis transformatif dan interseksional*. Jurnal UNJ, Vol, 7, No, 1 (2025) Jakarta : Universitas Negeri jakarta, Hal. 30.

²⁴ Nana Sukmadinata, 2021, *Metode Penelitian Pendidikan* , Medan : Yayasan Kita Menulis, Hal. 75.

menguraikan inisiatif pemerintah Prancis untuk memajukan kesetaraan gender di Prancis. Penelitian kualitatif ialah metode penelitian dengan data penelitian yang bersifat deskriptif dengan penjabaran atau analisis. Metodologi penelitian kualitatif berusaha untuk menggambarkan suatu kejadian melalui interaksi sosial, dan juga persepsi individu atau kelompok.²⁵

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.2.1 Batasan Waktu

Prancis dipilih karena masa menjabat Presiden Emmanuel Macron sejak 2017, yang telah mempengaruhi kebijakan publik feminis dan kesetaraan gender. Macron telah berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan melalui berbagai inisiatif dan upaya kebijakan. Macron telah memperkenalkan kebijakan publik feminis yang berfokus pada pengurangan kesenjangan dan meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan keamanan. Pada *International Women's Day* 2017, Macron memanggil komunitas internasional untuk ikut andil dalam mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang menjadi prioritas bagi Prancis. Prancis memegang Kepresidenan Dewan Uni Eropa (*PFUE*) dari Januari hingga Juni 2022, yang telah menjadikan perjuangan melawan kekerasan berbasis seksual dan gender serta pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai prioritas bersama.

²⁵ Yogi Febriansyah, *Kajian Visual Poster Film Drama Pendidikan Sutradara Riri Riza Produksi Miles Films 2005 – 2013*, Thesis. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, Hal. 81

Pada tahun 2022 Prancis memiliki indeks kesetaraan gender yang relatif tinggi, dengan skor 75,1% dan telah meningkat lebih cepat dibandingkan negara-negara anggota lainnya. Dengan memahami kebijakan publik feminis Prancis berfokus pada pengurangan kesenjangan dan meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam negosiasi perdamaian dan proses pengambilan keputusan. Prancis telah meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan keamanan, serta telah meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kekuasaan ekonomi dan politik. Dengan demikian, masa menjabat Presiden Macron sejak 2019 telah mempengaruhi kebijakan publik feminis dan kesetaraan gender Prancis, serta meningkatkan komitmen untuk memajukan kesetaraan gender melalui berbagai inisiatif dan kebijakan sampai tahun 2023.

1.6.2.2 Batasan Materi

Fokus utama dari penelitian mengenai upaya pemerintah Perancis dalam meningkatkan kesetaraan gender pada era Emmanuel Macron.

1.6.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Studi kepustakaan didapatkan berdasarkan banyak data yang dikumpulkan dari skripsi, beberapa buku, publikasi ilmiah, thesis, jurnal ilmiah, disertasi serta sumber resmi di internet.²⁶

²⁶ Yogi Febriansyah, *Kajian Visual Poster Film Drama Pendidikan Sutradara Riri Riza Produksi Miles Films 2005 – 2013*, Thesis. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, Hal. 81

1.7 Argumen Pokok

Emmanuel Macron melakukan upaya-upaya kebijakan yang telah dilakukan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai bidang kehidupan yakni dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan kerjasama internasional maupun nasional.

1.8 Outline / Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

| BAB | SUB BAB |
|----------------------|--|
| BAB I Pendahuluan | 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Konseptual 1.5.2 Konsep Kebijakan Publik Feminis 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian |

| | |
|---|---|
| | <p>1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.6.2.1 Batasan Waktu</p> <p>1.6.2.2 Batasan Materi</p> <p>1.6.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p> |
| <p>BAB II</p> <p>KONDISI KESETARAAN GENDER DI PERANCIS</p> | <p>2.1 Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik</p> <p>2.2 Kesetaraan Gender dalam Bidang Sosial</p> <p>2.3 Kesetaraan Gender dalam Bidang Ekonomi</p> |
| <p>BAB III</p> <p>UPAYA MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG POLITIK</p> | <p>3.1 Komitmen untuk memiliki kabinet yang seimbang secara gender.</p> <p>3.2 Pelatihan wajib tentang meningkatkan kesetaraan gender untuk semua diplomat Perancis.</p> <p>3.3 Pembentukan komite parlementer khusus pada tahun 2019</p> |
| <p>BAB IV</p> <p>UPAYA MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG SOSIAL</p> | <p>4.1 Pendidikan</p> |

| | |
|-------|---|
| | <p>4.1.1 Memasukkan Materi Kesetaraan gender dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah</p> <p>4.1.2 Peluncuran program beasiswa internasional untuk perempuan di bidang STEM</p> <p>4.2 Kebijakan Keluarga Rumah Tangga dan Pekerjaan</p> <p>4.2.1 Dorongan untuk pembagian tanggung jawab pengasuhan anak yang lebih setara</p> <p>4.2.2 Peningkatan akses dan kualitas layanan penitipan anak.</p> <p>4.3 Kesehatan</p> <p>4.3.1 UU No. 2018-703 tentang Kekerasan Seksual dan Seksisme (Loi Schiappa)</p> <p>4.3.2 Reformasi Sistem Kesehatan</p> |
| BAB V | <p>5.1 Pemerintah Perancis memperkenalkan Index de l'égalité professionnelle atau Indeks Kesetaraan Profesional</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>5.2 Insentif pajak untuk investasi pada bisnis yang dipimpin perempuan.</p> <p>5.3 Penerapan Evolusi dari Undang-Undang Copé-Zimmermann</p> |
| <p>BAB VI</p> <p>Penutup</p> | <p>6.1 Kesimpulan</p> <p>6.2 Saran</p> |

